












**KEMENTERIAN KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIAT JENDERAL  
BIRO KEPEGAWAIAN**

Nomor SOP	: OT.02.01/4/4821/2019
Tgl. Pembuatan	: 25 September 2019
Tgl. Revisi	:
Tgl. Efektif	: 1 Oktober 2019
Disahkan oleh	:
	 Kepala Biro Kepegawaian, <b>Suhartati, S.Kp, M.Kes</b> NIP. 196007271985012001
Nama SOP	<b>Penyelesaian Konsep SK Pemberhentian PNS Karena Melakukan Tindak Pidana/Tidak Melapor Setelah Cuti Di Luar Tanggungan Negara/Mencalonkan Atau Dicalonkan Menjadi Presiden/Wakil Presiden/Anggota DPR,DPD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota/Anggota/Pengurus Partai Politik</b>

<b>Dasar hukum :</b> 1 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2 PP Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNS Menjadi Anggota Partai Politik 3 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS 4 SE Ka BAKN Nomor 04/SE/1980 tentang Pemberhentian PNS	<b>Kualifikasi Pelaksana :</b> 1 Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberhentian PNS 2 Memahami pedoman/juklak/juknis tentang pemberhentian PNS
<b>Keterkaitan :</b> 1 SOP Pengelolaan Surat Masuk 2 SOP Permintaan Kelengkapan Berkas	<b>Peralatan / Perlengkapan :</b> 1 Peraturan perundang-undangan dan pedoman/juklak/juknis tentang pemberhentian PNS 2 Komputer dengan program Microsoft Office
<b>Peringatan :</b> Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka konsep SK Pemberhentian PNS Karena Melakukan Tindak Pidana/Tidak Melapor Setelah Cuti Di Luar Tanggungan Negara/Mencalonkan Atau Dicalonkan Menjadi Presiden/Wakil Presiden/Anggota DPR,DPD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota/Anggota/Pengurus Partai Politik tidak dapat terselesaikan dengan baik	<b>Pencatatan dan Pendataan :</b> Penyelesaian konsep SK Pemberhentian PNS Karena Melakukan Tindak Pidana/Tidak Melapor Setelah Cuti Di Luar Tanggungan Negara/Mencalonkan Atau Dicalonkan Menjadi Presiden/Wakil Presiden/Anggota DPR,DPD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota/Anggota/Pengurus Partai Politik dicatat dalam buku agenda Sub Bagian Peraturan Kepegawaian dan Penegakan Disiplin Pegawai

Prosedur Penyelesaian Konsep Sk Pemberhentian Pns Karena Melakukan Tindak Pidana/Tidak Melapor Setelah Cuti Di Luar Tanggungan Negara/Mencalonkan Atau Dicalonkan Menjadi Presiden/ Wakil Presiden/Anggota Dpr,Dpd/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota/Anggota/Menjadi Anggota/Pengurus Partai Politik

NO	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Karopeg	Kabag Disiplin dan Kesra Pegawai	Kasubbag Ranwai dan Gakdiswai	Analisis Kepegawaian	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan arahan kepada Kabag Disiplin dan Kesra Pegawai terkait penyelesaian konsep SK Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana/Tidak Melapor Setelah CLTN/Menjadi Anggota/Pengurus Partai Politik					Berkas usulan pemberhentian karena melakukan tindak pidana/tidak melapor setelah CLTN/ menjadi anggota/pengurus partai politik	1 menit	Arahan, berkas usulan pemberhentian karena melakukan tindak pidana/tidak melapor setelah CLTN/ menjadi anggota/pengurus partai politik	Terkait dengan SOP Pengelolaan surat masuk
2	Memberikan instruksi kepada Kasubbag Ranwai dan Gakdiswai untuk menyelesaikan konsep SK Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana/Tidak Melapor Setelah CLTN/Menjadi Anggota/Pengurus Partai Politik					Arahan, berkas usulan pemberhentian karena melakukan tindak pidana/tidak melapor setelah CLTN/ menjadi anggota/pengurus partai politik	1 menit	Disposisi, berkas usulan pemberhentian karena melakukan tindak pidana/tidak melapor setelah CLTN/ menjadi anggota/pengurus partai politik	
3	Menganalisa, mengkonsep dan mengugaskan Analisis Kepegawaian untuk menyelesaikan konsep SK Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana/Tidak Melapor Setelah CLTN/Menjadi Anggota/Pengurus Partai Politik					Disposisi, berkas usulan pemberhentian karena melakukan tindak pidana/tidak melapor setelah CLTN/ menjadi anggota/pengurus partai politik	30 menit	Berkas usulan pemberhentian karena melakukan tindak pidana/tidak melapor setelah CLTN/ menjadi anggota/pengurus partai politik	Apabila dipandang perlu dapat dilakukan pemeriksaan yang dituangkan ke dalam BAP
4	Mencatat berkas dan melakukan verifikasi serta memeriksa kelengkapan dan keabsahan berkas usulan					Berkas usulan pemberhentian karena melakukan tindak pidana/tidak melapor setelah CLTN/ menjadi anggota/pengurus partai politik	18 menit	Berkas usulan yang telah diperiksa kelengkapannya dan diverifikasi	Terkait dengan SOP Permintaan Kelengkapan Berkas (dalam hal berkas tidak lengkap)
5	Menyusun konsep telaahan staf dan SK Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana/Tidak Melapor Setelah CLTN/Menjadi Anggota/Pengurus Partai Politik					Berkas usulan yang telah diperiksa kelengkapannya dan diverifikasi	120 menit	Konsep telaahan staf dan SK	Apabila dipandang perlu, Kasubbag bersama Analisis Kepegawaian dapat meminta pertimbangan dari BKN
6	Mempelajari, menelaah konsep telaahan staf					Konsep telaahan staf dan SK	50 menit	Konsep telaahan staf yang telah dikoreksi oleh Kasubbag dan SK	Dalam hal terdapat koreksi, Analisis Kepegawaian memperbaiki konsep telaahan staf dan SK
7	Memeriksa dan memberikan paraf pada konsep telaahan staf					Konsep telaahan staf yang telah dikoreksi oleh Kasubbag dan SK	30 menit	Konsep telaahan staf yang telah diparaf oleh Kabag dan konsep SK	Dalam hal terdapat koreksi, Kasubbag bersama dengan Analisis Kepegawaian memperbaiki konsep telaahan staf dan SK
8	Memeriksa, memberikan paraf pada konsep telaahan staf dan konsep SK Pemberhentian Karena Tindak Pidana/Tidak Melapor Setelah Cuti Di Luar Tanggungan Negara/Mencalonkan Atau Dicalonkan Menjadi Presiden/Wakil Presiden/Anggota DPR,DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota/Anggota/Pengurus Partai Politik					Konsep telaahan staf yang telah diparaf oleh Kabag dan konsep SK	30 menit	telaahan staf serta konsep SK yang telah diparaf oleh Karopeg	Dalam hal terdapat koreksi, Kasubbag bersama dengan Analisis Kepegawaian memperbaiki konsep telaahan staf dan SK

